

DINAMIKA ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA PASCA PENGUSIRAN DARI WILAYAH MYANMAR 2017-2024

Dita Puji Rahayu¹, Nurrohim²

^{1,2}Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
PurwokertoFakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora,
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

[1ditapujirahayu13@gmail.com](mailto:ditapujirahayu13@gmail.com), [2nurrohim@uinsaizu.ac.id](mailto:nurrohim@uinsaizu.ac.id)

ABSTRACT

This research focuses on the social, economic and cultural dynamics of the Rohingya ethnicity in Indonesia after the expulsion from Myanmar in 2017. The purpose of this research is to analyze the living conditions of Rohingya refugees and the challenges and opportunities of their integration in Indonesia. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through documentation studies of NGO reports, news, and academic literature. The results show that Rohingya refugees face various challenges, such as unclear legal status, limited access to education and employment, and social discrimination, despite solidarity from local communities and NGO assistance. Their cultural identity is negotiated between preserving tradition and adapting to local culture. Inclusive policies from the government, NGO support, and international collaboration are needed to improve the welfare and integration of Rohingya refugees in Indonesia.

Keywords: Public Policy, Social Integration, Rohingya Refugee

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dinamika sosial, ekonomi, dan budaya etnis Rohingya di Indonesia pasca pengusiran dari Myanmar tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi kehidupan pengungsi Rohingya serta tantangan dan peluang integrasi mereka di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi dari laporan NGO, berita, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya menghadapi berbagai tantangan, seperti status hukum yang tidak jelas, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta diskriminasi sosial, meskipun terdapat solidaritas dari masyarakat lokal dan bantuan NGO. Identitas budaya mereka mengalami negosiasi antara upaya pelestarian tradisi dengan adaptasi terhadap budaya lokal. Diperlukan kebijakan inklusif dari pemerintah, dukungan NGO, serta kolaborasi internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan integrasi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi Sosial, Kebijakan Publik, Pengungsi Rohingya

A. Pendahuluan

Konflik yang menyebabkan pengusiran etnis Muslim Rohingya dari Myanmar pada tahun 2017 berakar dari sejarah panjang ketegangan etnis dan agama di negara tersebut. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di Negara Bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar. Mereka telah lama menghadapi diskriminasi, marginalisasi, dan penolakan hak-hak dasar oleh pemerintah Myanmar. Salah satu penyebab utama konflik adalah penolakan pemerintah untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, Rohingya dianggap sebagai "imigran ilegal" dari Bangladesh, meskipun mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi (Setiaji dan Fajriani 2022). Titik kritis yang memperburuk situasi terjadi pada Agustus 2017, ketika kelompok bersenjata bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang pos polisi dan militer di Rakhine. Serangan ini memicu respons keras dari militer Myanmar (Tatmadaw), yang melancarkan operasi besar-besaran dengan dalih

memerangi terorisme. Namun, operasi militer ini berubah menjadi aksi kekerasan sistemik yang mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Serangan ini menyebabkan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri (Sampaonthong 2023).

Komunitas internasional mengecam keras tindakan Myanmar dan menyebutnya sebagai pembersihan etnis, bahkan beberapa organisasi hak asasi manusia menyebutnya sebagai genosida. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai lembaga lainnya menunjukkan bukti adanya niat sistematis untuk mengusir Rohingya dari Myanmar. Kampanye militer ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan kehadiran fisik Rohingya di Rakhine tetapi juga menghancurkan identitas budaya dan sejarah mereka (Wildan 2022).

Pengusiran ini memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi Rohingya sendiri maupun bagi negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar di

Bangladesh, para pengungsi menghadapi kondisi hidup yang sulit, termasuk akses terbatas ke kebutuhan dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, krisis Rohingya juga memicu ketegangan politik dan diplomatik di kawasan Asia Tenggara, terutama di antara anggota ASEAN, karena Myanmar terus menolak tanggung jawab dan menunda proses repatriasi (Mardiyanto 2024).

Secara keseluruhan, pengusiran etnis Rohingya dari Myanmar pada tahun 2017 merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Kejadian ini tidak hanya mencerminkan kegagalan Myanmar dalam melindungi warganya tetapi juga menunjukkan kelemahan komunitas internasional dalam mencegah pelanggaran berat hak asasi manusia (Sopamena 2023). Penyelesaian krisis ini memerlukan langkah nyata dari komunitas internasional, termasuk sanksi terhadap pemerintah Myanmar, dukungan bagi pengungsi, serta upaya untuk memastikan akuntabilitas atas kekejaman yang terjadi.

Konflik yang melibatkan pengusiran etnis Rohingya dari Myanmar tidak

hanya menciptakan krisis kemanusiaan di tingkat lokal, tetapi juga berdampak besar pada pola migrasi regional. Akibat kekerasan sistemik yang terjadi pada tahun 2017, ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. Negara seperti Bangladesh menjadi tujuan utama karena kedekatan geografisnya dengan Negara Bagian Rakhine, namun banyak dari pengungsi juga mencoba mencari perlindungan di negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Bagi Indonesia, migrasi Rohingya menjadi tantangan kemanusiaan yang kompleks. Meskipun letaknya lebih jauh dari Myanmar, Indonesia sering kali menjadi tujuan atau transit bagi para pengungsi Rohingya yang melakukan perjalanan melalui laut. Mereka biasanya menaiki perahu kecil yang tidak layak dan menghadapi perjalanan panjang yang penuh risiko, seperti ancaman tenggelam, kelaparan, dehidrasi, dan eksploitasi oleh jaringan penyelundup manusia. Gelombang migrasi ini diperparah oleh kondisi keamanan di Myanmar yang terus memburuk, sehingga membuat para pengungsi tidak

memiliki pilihan lain selain meninggalkan tanah air mereka (Hartanto 2024).

Sejak pengusiran besar-besaran dari Myanmar pada tahun 2017, etnis Rohingya telah melakukan perjalanan panjang dan berbahaya untuk mencari perlindungan, termasuk ke Indonesia. Mayoritas pengungsi tiba melalui jalur laut, menggunakan perahu yang tidak layak, dan sering kali menghadapi risiko besar seperti tenggelam, kelaparan, serta eksploitasi oleh jaringan penyelundupan manusia. Setibanya di Indonesia, mereka biasanya mendarat di wilayah-wilayah pesisir seperti Aceh dan Sumatera Utara, yang secara geografis lebih dekat dengan rute migrasi mereka. Pemerintah Indonesia, meskipun bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, tetap memberikan perlindungan sementara berdasarkan prinsip kemanusiaan. Di Aceh, masyarakat lokal menunjukkan solidaritas yang besar terhadap pengungsi Rohingya, mengingat adanya kesamaan dalam agama dan nilai budaya. Bantuan yang diberikan oleh warga meliputi makanan, tempat tinggal sementara, serta akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya lebih banyak berfokus pada bantuan kemanusiaan dan kerja sama dengan organisasi internasional. Pemerintah tidak memberikan status pengungsi resmi, tetapi memungkinkan pengungsi untuk tinggal sementara di Indonesia dengan pengawasan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Selain itu, kebijakan yang diterapkan lebih mengarah pada aspek perlindungan sementara dan pencegahan tindak perdagangan manusia yang sering kali mengancam para pengungsi. Meskipun ada upaya dari pemerintah dalam menangani kedatangan pengungsi, keterbatasan regulasi dan sumber daya masih menjadi kendala utama. Tanpa adanya kebijakan yang lebih komprehensif terkait pengungsi, Rohingya di Indonesia tetap hidup dalam ketidakpastian hukum, dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, serta hak-hak dasar lainnya.

Selain tantangan kemanusiaan, migrasi Rohingya juga

menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi Indonesia. Banyak pengungsi hidup dalam kondisi yang sangat terbatas di kamp-kamp pengungsian atau pusat detensi. Mereka sering menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Situasi ini tidak hanya memperburuk kondisi kehidupan pengungsi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan di wilayah-wilayah tertentu, terutama jika terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan. Di sisi lain, solidaritas masyarakat lokal yang kuat, terutama di Aceh, telah membantu meredam potensi konflik sosial (Rahmatillah 2025).

Di tingkat regional, migrasi Rohingya ke negara-negara seperti Indonesia juga memicu tantangan diplomatik. ASEAN sebagai organisasi regional belum mampu memberikan solusi efektif untuk krisis ini, mengingat pendekatan non-intervensi yang dipegang teguh oleh anggotanya. Situasi ini memperlihatkan keterbatasan ASEAN dalam menangani isu-isu lintas batas seperti migrasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, migrasi Rohingya akibat konflik di Myanmar memberikan tantangan multidimensi bagi Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan. Upaya internasional yang lebih terkoordinasi diperlukan untuk menangani krisis ini secara berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan perlindungan bagi pengungsi, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta upaya diplomasi untuk menekan pemerintah Myanmar agar mengambil tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan repatriasi secara aman dan bermartabat (Ramadhan 2023).

Penelitian ini penting untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya etnis Rohingya di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kehidupan setelah melarikan diri dari konflik di Myanmar. Sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951, Indonesia hanya memberikan perlindungan sementara tanpa status resmi, yang membatasi akses pengungsi Rohingya terhadap pendidikan formal, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Akibatnya, banyak dari mereka hidup

dalam ketidakpastian ekonomi dan bergantung pada bantuan organisasi kemanusiaan serta solidaritas masyarakat lokal. Selain itu, tantangan sosial seperti stigma terhadap pengungsi memperburuk proses integrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan latar belakang dan eskalasi konflik yang menyebabkan eksodus etnis Rohingya dari Myanmar, tetapi juga memberikan kontribusi akademik terhadap isu global mengenai perlindungan pengungsi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam menangani krisis kemanusiaan lintas batas. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menyoroti dinamika sosial-politik yang muncul akibat kedatangan pengungsi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan nasional merespons isu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam bentuk analisis kritis atas kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia yang belum terstruktur secara komprehensif, sekaligus memberikan dasar pertimbangan bagi pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan migrasi internasional.

Di sisi lain, identitas budaya Rohingya menghadapi tantangan besar dalam lingkungan baru, di mana mereka berusaha mempertahankan tradisi dan nilai-nilai komunitas sambil menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Interaksi dengan masyarakat lokal, khususnya di daerah seperti Aceh yang memiliki solidaritas berbasis agama, membantu memperkuat rasa kebersamaan dan mendukung adaptasi budaya mereka. Namun, kurangnya kebijakan yang inklusif menghambat integrasi mereka secara penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Indonesia pasca pengusiran dari Myanmar pada tahun 2017, serta menganalisis respons pemerintah Indonesia terhadap keberadaan mereka dalam konteks kebijakan pengungsi. Fokus utama terletak pada identifikasi tantangan utama yang dihadapi komunitas Rohingya, termasuk status hukum, akses terhadap layanan dasar, dan proses integrasi sosial di tengah keterbatasan kebijakan nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wawasan teoritis dalam studi migrasi, sosial, dan

budaya, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi perlindungan pengungsi, khususnya dalam konteks negara seperti Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, NGO, dan aktor kemanusiaan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk perluasan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja guna mendukung proses integrasi pengungsi Rohingya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya solidaritas dan perlindungan hak-hak dasar bagi kelompok rentan, serta memperkuat dasar moral dan politik bagi advokasi pengungsi di tingkat nasional dan regional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini untuk menganalisis kondisi ketnis Muslim

Rohingya di Indonesia. Empat tahapan utama yang digunakan yaitu Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 2013:69)

Heuristik adalah proses menemukan atau mencari data untuk mengumpulkan sumber yang diperlukan dengan menggunakan objek penelitian yang akan dipelajari. Metode yang digunakan dalam tahap ini termasuk pencarian dan pengumpulan sumber sekunder yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber sekunder terdiri dari buku, Jurnal Ilmiah, dan berita yang diambil dari media terpercaya yang membahas kondisi kehidupan etnis Rohingya di Pengungsian.

Setelah sumber lengkap melakukan tahap verifikasi untuk memastikan bahwa data itu akurat dan reabilitas data. Dua metode yang digunakan untuk memverifikasi yaitu, kritik internal melibatkan analisis terhadap isi sumber untuk menilai objektivitas dan keakuratan informasi. kritik eksternal dilakukan dengan pemeriksaan keaslian dokumen dan kredibilitas sumber terhadap laporan UNHCR, atau NGO. (Dudung, 2011: 108).

Tahap berikutnya yaitu interpretasi pada tahapan ini,

informasi yang dapat dipercaya diperiksa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi etnis Rohingya di daerah pengungsian. Tahap ini peneliti berusaha untuk menemukan pola, hubungan sebab akibat, dan konteks yang lebih luas dengan menghubungkan berbagai peristiwa sejarah. Dalam proses penafsirannya menggunakan pendekatan analisis dilakukan dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi kehidupan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Analisis ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu kondisi sosial ekonomi, identitas budaya, tantangan dan peluang, dinamika hubungan dengan masyarakat lokal, serta dampak global dan regional.

Tahapan terakhir metode sejarah dikenal sebagai historiografi, dimana temuan penelitian disusun secara sistematis dan argumentatif. Tahap ini dalam penelitian pengungsi etnis Rohingya menyajikan tulisan sejarah yang komprehensif dari informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Dalam metode ini menggunakan Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk

memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang diamati, seperti tantangan adaptasi, interaksi dengan masyarakat lokal, serta upaya mempertahankan identitas budaya. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar berbagai faktor yang memengaruhi proses adaptasi dan integrasi komunitas Rohingya di lingkungan baru.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Sejarah etnis Rohingya masuk ke Indonesia

Kehadiran Burma di Negara Bagian Rakhine mengalami konflik antara Rohingya dan kelompok etnis lain di Negara Bagian Rakhine sekitar tahun 1870, yang berujung pada konflik Rohingya. Ini berlanjut hingga tahun 20-an dan 30-an, ketika ekonomi mengalami resesi yang parah, hingga penduduk Burma menargetkan Rohingya dan memaksa sebagian dari mereka meninggalkan wilayah mereka. Sebagian pengungsi Rohingya mengungsi ke negara terdekat seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Masuknya Rohingya ke Indonesia mendapat penanganan oleh pemerintah Indonesia.(Hamdi dkk., 2023)

Indonesia sendiri dengan daratan yang cukup luas menjadi salah satu destinasi negara yang sering kedatangan pengungsi internasional khususnya suku Rohingya.(Hidayatullah & Novialdi, 2023). Sejak beberapa dekade terakhir, etnis Rohingya menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan penolakan status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, yang memaksa mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga. Indonesia, sebagai negara dengan komitmen tinggi terhadap hak asasi manusia dan stabilitas regional, telah mengambil peran aktif dalam menangani pengungsi Rohingya, khususnya di wilayah perbatasan negara.

Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia tercatat signifikan pada tahun 2009, di mana 193 orang ditemukan terdampar di Sabang, Provinsi Riau, disusul oleh 198 orang lainnya di Riau. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap penanganan para pengungsi ini, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Konflik horizontal dan diskriminasi etnis Rohingya sudah menjadi perhatian regional Asia Tenggara bahkan komunitas internasional. Namun penanganan dari regional Asia Tenggara dan internasional terkesan lambat. Negara-negara Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan bahkan menolak hadirnya pengungsi Rohingya yang datang ke kedaulatannya. Selain Thailand dan Malaysia, Indonesia juga menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah kedaulatan Indonesia pada awal tahun 2015. Etnis Rohingya yang melakukan eksodus dengan menggunakan jasa kapal juga disebut sebagai "*manusia perahu*". Fenomena manusia perahu ini menyebabkan tiga negara yang berbatasan langsung dengan Laut Andaman yakni Thailand, Malaysia dan Indonesia mengalami kesulitan untuk memutuskan kebijakan apa yang akan diterapkan kepada para manusia perahu ini. Mereka tidak ingin kehadiran manusia perahu atau etnis Rohingya ke negara mereka mengancam kondisi sosial internal negara, selain itu ketiga negara ini juga menilai bahwa konflik ini seharusnya menjadi konflik yang

diselesaikan secara internal oleh Myanmar dan tidak membebani negara Asia Tenggara yang lain.

Pada awal tahun 2015, Rohingya terdampar di Laut Andaman dekat perbatasan Indonesia. Sedangkan kelompok yang lebih besar berlayar menuju Malaysia dan Thailand. Awalnya, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand menolak orang-orang ini masuk ke wilayah mereka. Namun, setelah tekanan dari komunitas nasional dan internasional, mereka setuju untuk menyambut pengungsi Rohingya. Keputusan ini dibuat melalui pertemuan tiga pihak di Malaysia. Ketiga pihak yang melibatkan diri dalam pertemuan tersebut yakni negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand menghasilkan suatu kebijakan dan solusi sementara dimana krisis pengungsi Rohingya dapat diselesaikan untuk jangka waktu satu tahun. Selama krisis, beberapa mitra ASEAN tidak menunjukkan banyak dukungan. Australia justru menghadapi tuduhan membayar penyelundup manusia untuk mengirim Rohingya kembali ke perairan Indonesia. (Dwijayanto dkk., 2019)

Keberadaan imigran Rohingya di Indonesia tersebar di beberapa daerah yaitu Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau) dan beberapa orang ditemukan di Kupang, Banten dan Banyuwangi. Namun, di antara wilayah tersebut, Aceh paling banyak dikunjungi pengungsi Rohingya. Hal ini tidak terlepas karena wilayah Aceh secara geografis paling dekat dengan Myanmar. Imigran Rohingya di Aceh tersebar di Lhokseumawe, Sabang, Idi Rayeuk dan Aceh Timur.

Imigran Rohingya masuk ke Provinsi Aceh pada tanggal 10 Mei 2015 tepatnya di Aceh Utara. Kedatangan imigran Rohingya saat itu di terima oleh negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah bekerjasama dengan UNHCR dan IOM untuk mengambil langkah-langkah awal, seperti merawat mereka, menyediakan tempat penampungan sementara, papan, pangan dan obat-obatan yang diperlukan. UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berupaya mencari tempat penampungan, termasuk kemungkinan tetap di Indonesia.

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang banyak

dimasuki pengungsi Rohingya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga Oktober 2021, terdapat sekitar 16.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di Aceh, Indonesia. Mayoritas pengungsi ini adalah pengungsi yang tiba pada tahun 2015, saat itu sekitar 1.000 orang Rohingya terdampar di lepas pantai Aceh. Setelahnya jumlah pengungsi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 setelah Topan Amphan menghancurkan banyak kamp pengungsian di Bangladesh, sehingga memaksa banyak pengungsi Rohingya untuk mencari suaka di negara lain, termasuk Indonesia. Berdasarkan Data dari PPID Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa jumlah kedatangan pengungsi Rohingya sangatlah bervariasi. Ditahun 2015 misalnya terdapat sebanyak 1365 pengungsi yang ada di Provinsi Aceh namun jumlah kedatangan pengungsi berkurang ditanggung 2018 yaitu sebanyak 89 orang, dan kembali meningkat ditahun 2022 sebanyak 654 orang. Adapun data ini sepenuhnya dimiliki oleh UNHCR dan IOM, namun data ini dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri

selaku Pemerintah Indonesia yang didasarkan pada Momerandum of Understanding (MoU) tahun 2019. (Hidayatullah & Novialdi, 2023)

Status hukum Rohingya di Indonesia

Secara hukum, status pengungsi Rohingya di Indonesia berada dalam posisi yang tidak pasti. Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum internasional secara langsung untuk memberikan perlindungan permanen kepada pengungsi (Hartanto, 2024). Meskipun demikian, Indonesia tetap memberikan perlindungan sementara atas dasar kemanusiaan, dengan mengizinkan keberadaan pengungsi Rohingya di wilayahnya tanpa memberikan status kewarganegaraan atau izin tinggal tetap. Status ini membuat pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai "orang dalam pencarian suaka" atau "pengungsi" di bawah koordinasi UNHCR dan IOM, bukan sebagai bagian dari warga negara atau penduduk resmi Indonesia (Aling dkk., 2024).

Ketiadaan status hukum yang jelas menyebabkan para pengungsi Rohingya menghadapi berbagai

keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Indonesia. Mereka tidak memiliki dokumen resmi dari negara yang dapat digunakan untuk mengakses pendidikan formal, pekerjaan legal, atau layanan kesehatan yang setara dengan warga lokal. Situasi ini menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap bantuan NGO dan lembaga internasional, serta membuka potensi eksploitasi terhadap pengungsi karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Meski tinggal dalam jangka waktu yang panjang, mereka tetap berada dalam status transisi yang tidak pasti, tanpa arah kebijakan jelas mengenai integrasi, relokasi, atau repatriasi (Sopamena, 2023).

Mengenai kemungkinan pemulangan, hingga saat ini Indonesia tidak memiliki kebijakan resmi yang memaksa pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar, mengingat kondisi di negara asal mereka belum aman dan stabil. Langkah pemulangan paksa (refoulement) juga bertentangan dengan prinsip non-refoulement dalam hukum internasional, yang meskipun tidak mengikat secara hukum bagi Indonesia, tetap dipegang

sebagai prinsip kemanusiaan universal. Di sisi lain, naturalisasi juga tidak menjadi opsi karena ketiadaan landasan hukum dan politik untuk memberikan status kewarganegaraan kepada pengungsi (Asmara & Syahrin, 2019). Oleh karena itu, status pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini adalah sebagai penduduk sementara tanpa kewarganegaraan, yang menunggu solusi jangka panjang melalui integrasi di negara ketiga, repatriasi sukarela jika memungkinkan, atau pembentukan kerangka kebijakan nasional yang lebih inklusif di masa mendatang.

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Status hukum pengungsi Rohingya di Indonesia menjadi tantangan utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak memberikan status hukum resmi kepada pengungsi, termasuk komunitas Rohingya. Akibatnya, mereka hanya mendapatkan perlindungan sementara tanpa jaminan hak-hak dasar. Ketidakpastian status hukum ini memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang

layak. Anak-anak pengungsi sering kali kesulitan mengakses sekolah formal karena kendala administrasi dan biaya, sementara orang dewasa tidak memiliki izin kerja resmi, sehingga terpaksa mengandalkan pekerjaan informal yang sering kali beresiko dan bergaji rendah (Hartanto, 2024).

Bantuan yang diterima oleh komunitas Rohingya datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat setempat. NGO memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan pendidikan informal. Pemerintah Indonesia, meskipun dengan keterbatasan, telah memberikan perlindungan sementara dan mengizinkan NGO untuk bekerja sama dalam menangani pengungsi (Ahmad dkk., 2024). Selain itu, masyarakat lokal, khususnya di wilayah seperti Aceh, menunjukkan solidaritas yang besar dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal sementara. Namun, bantuan ini sering bersifat sementara dan tidak mencukupi untuk menjamin

keberlanjutan hidup pengungsi dalam jangka panjang.

Komunitas Rohingya sendiri berperan aktif dalam mengorganisasi kehidupan mereka di kamp pengungsi. Dalam keterbatasan, mereka membentuk struktur komunitas yang bertujuan untuk menjaga harmoni dan membantu sesama pengungsi. Pemimpin komunitas, yang biasanya dipilih berdasarkan pengalaman dan kepercayaan, mengambil tanggung jawab untuk mengelola distribusi bantuan, menyelesaikan konflik internal, dan berkomunikasi dengan pihak eksternal, seperti NGO atau pemerintah setempat. Selain itu, komunitas Rohingya sering mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan untuk menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat identitas mereka di tengah kondisi sulit (Nabilah dkk., 2024).

Meski demikian, kehidupan di kamp pengungsi tetap penuh dengan tantangan. Keterbatasan fasilitas dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan ruang tinggal yang memadai, menjadi masalah yang terus dihadapi. Situasi ini menyebabkan banyak pengungsi hidup dalam kondisi yang tidak sehat, yang berpotensi memicu masalah

kesehatan. Selain itu, ketidakpastian masa depan dan kurangnya akses terhadap pendidikan formal membuat generasi muda Rohingya kehilangan kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pengungsi membutuhkan perhatian lebih besar, baik dari pemerintah maupun pihak internasional.

Di sisi lain, interaksi antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal menunjukkan dinamika sosial yang menarik. Di beberapa daerah, masyarakat lokal menyambut pengungsi dengan tangan terbuka dan menunjukkan solidaritas berbasis agama atau nilai kemanusiaan. Namun, di daerah lain, terdapat potensi konflik atau ketegangan akibat persepsi negatif terhadap pengungsi, terutama jika masyarakat lokal juga menghadapi tantangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan kebijakan yang mendukung integrasi sosial, seperti program peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan pengungsi, guna menciptakan hubungan yang harmonis antara pengungsi dan masyarakat lokal (Addini, 2025).

Identitas Budaya

Komunitas Rohingya di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan tradisi dan budaya mereka di lingkungan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berusaha menjaga bahasa, adat istiadat, dan praktik keagamaan yang menjadi inti dari identitas komunitas mereka. Misalnya, mereka sering mengadakan kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, perayaan hari besar Islam, dan pengajaran Al-Qur'an kepada anak-anak di kamp pengungsi. Pakaian tradisional juga sering dipakai, khususnya oleh wanita Rohingya, sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya. Namun, dengan kondisi yang terbatas di pengungsian, upaya ini sering kali dihadapkan pada kendala sumber daya dan fasilitas yang memadai.

Interaksi dengan budaya lokal Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dalam kehidupan komunitas Rohingya. Di satu sisi, kesamaan keyakinan agama, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Aceh, memberikan titik temu yang memperkuat solidaritas antara pengungsi dan masyarakat lokal. Tradisi dan nilai-nilai Islami sering menjadi dasar hubungan yang

harmonis, misalnya melalui kerja sama dalam kegiatan keagamaan atau komunitas. Di sisi lain, terdapat perbedaan budaya, seperti bahasa dan cara hidup, yang memengaruhi proses adaptasi komunitas Rohingya. Mereka harus menavigasi perbedaan ini dengan menyesuaikan diri pada norma-norma setempat, sambil tetap menjaga identitas budaya mereka (Siregar & Lubis, 2019).

Proses adaptasi di lingkungan baru ini juga memunculkan perubahan dalam identitas budaya komunitas Rohingya. Anak-anak dan generasi muda, yang tumbuh di lingkungan pengungsian di Indonesia, mulai terpapar pada budaya lokal melalui pendidikan, interaksi sosial, dan media. Mereka cenderung mengadopsi elemen budaya Indonesia, seperti bahasa dan gaya hidup, yang memungkinkan mereka berintegrasi lebih mudah. Sementara itu, generasi yang lebih tua sering menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi lama dan menerima perubahan. Proses ini menunjukkan adanya negosiasi identitas budaya yang berlangsung dalam komunitas Rohingya, di mana mereka mencoba menyeimbangkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan

lingkungan baru tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai kelompok etnis (O'Brien & Hoffstaedter, 2020).

Tantangan dan Peluang

Diskriminasi sosial dan hambatan integrasi merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh komunitas Rohingya di Indonesia. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki semangat solidaritas berbasis agama, masih ada ketegangan dan persepsi negatif terhadap pengungsi, terutama yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda. Diskriminasi ini sering kali muncul dalam bentuk stigma sosial, kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau bahkan kekurangan akses terhadap layanan dasar. Beberapa masyarakat lokal melihat pengungsi Rohingya sebagai beban tambahan bagi sumber daya yang terbatas, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Akibatnya, komunitas Rohingya sering merasa terisolasi, dan proses integrasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia menjadi lebih sulit (Machmud dkk., 2024).

Selain diskriminasi sosial, status hukum yang tidak jelas juga menjadi hambatan utama dalam upaya integrasi. Karena pengungsi Rohingya tidak memiliki status resmi yang

diakui, mereka kesulitan dalam mengakses berbagai peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Keterbatasan dalam hal akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan menghalangi mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tanpa akses yang memadai terhadap pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang sah, banyak anggota komunitas Rohingya terjebak dalam pekerjaan informal atau menjadi pengangguran. Ketidakpastian ini menciptakan rasa ketidakamanan dan menghambat proses adaptasi mereka di masyarakat Indonesia (Sopamena, 2023).

Namun, meskipun tantangan tersebut ada, terdapat peluang untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas Rohingya, terutama melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Meskipun akses pendidikan formal bagi pengungsi terbatas, beberapa NGO dan lembaga kemanusiaan telah menyediakan program pendidikan informal yang dapat membantu anak-anak dan orang dewasa mengembangkan keterampilan dasar. Program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan kerja di bidang keterampilan teknis atau wirausaha,

juga menjadi salah satu peluang yang dapat membantu anggota komunitas Rohingya untuk mandiri secara ekonomi. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, komunitas Rohingya dapat memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau membuka usaha kecil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka berintegrasi lebih baik dengan masyarakat lokal (Hossain, 2023).

Selain itu, kebijakan inklusif yang mendukung akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pengungsi dapat membuka peluang besar bagi komunitas Rohingya untuk beradaptasi lebih cepat dan lebih baik di Indonesia. Mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program-program pelatihan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan kemanusiaan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perekonomian lokal. Selain itu, dengan memperkuat jaringan sosial di antara pengungsi dan masyarakat lokal, peluang untuk integrasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis dapat tercipta.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar dalam hal diskriminasi sosial dan hambatan integrasi, peluang untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas Rohingya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi langkah penting dalam proses integrasi mereka. Kebijakan yang mendukung akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan kerja akan sangat membantu pengungsi dalam menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan mandiri, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan sosial mereka dengan masyarakat Indonesia.

Perkembangan Sosial dan Ekonomi

Kondisi pengungsi Rohingya di Indonesia terkait pekerjaan informal dan kesejahteraan ekonomi mencerminkan realitas yang sangat sulit. Tanpa status hukum yang jelas, banyak anggota komunitas Rohingya terpaksa bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan informal ini, seperti buruh kasar, pedagang kecil, atau pekerjaan serabutan lainnya, sering kali memiliki penghasilan yang tidak tetap dan rendah, yang menyulitkan mereka untuk merencanakan masa

depan atau mencapainya dalam kondisi yang lebih stabil. Ketidakpastian ekonomi yang dihadapi pengungsi, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan atau pekerjaan yang lebih terstruktur, menjadikan mereka sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sumber daya yang terbatas, seperti akses terbatas ke pasar kerja atau jaringan sosial yang lebih luas, semakin membatasi kesempatan mereka untuk berkembang secara ekonomi.

Bantuan internasional dan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan sosial komunitas Rohingya. Organisasi non-pemerintah (NGO) baik yang berbasis di Indonesia maupun internasional, memberikan berbagai bentuk bantuan yang mendasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan. Bantuan ini sangat krusial dalam menciptakan kondisi yang lebih layak bagi pengungsi Rohingya yang hidup dalam ketidakpastian. Selain itu, solidaritas masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah dengan konsentrasi pengungsi tinggi seperti Aceh, juga

memberikan kontribusi penting. Komunitas lokal sering memberikan sumbangan atau dukungan langsung kepada pengungsi melalui makanan, pakaian, dan bantuan lainnya. Meskipun demikian, meskipun bantuan ini berharga, keberlanjutan dan distribusi yang adil tetap menjadi masalah, karena pengungsi masih tergantung pada bantuan yang sifatnya tidak tetap dan tidak selalu mencakup semua kebutuhan mereka (satria.ardhin, 2023).

Peran lembaga pemerintah dan NGO dalam mendukung pengungsi sangat penting, tetapi tetap terbatas oleh kerangka kebijakan dan sumber daya yang ada. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi melalui kebijakan yang ada, meskipun belum ada kebijakan jangka panjang yang memberikan status tetap bagi pengungsi. Sementara itu, NGO memainkan peran lebih besar dalam menyediakan dukungan langsung dan pendampingan. Banyak NGO yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pengungsi, baik melalui bantuan material, pendidikan informal, maupun program pemberdayaan ekonomi. Namun, meskipun ada upaya baik dari pemerintah dan NGO, tantangan

terbesar tetap terkait dengan ketidakpastian hukum, yang menghalangi pengungsi untuk berintegrasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia (nuke, 2022). Oleh karena itu, meskipun ada perkembangan dalam hal bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, masih diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan pengungsi Rohingya dapat hidup dengan lebih mandiri dan stabil.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan dukungan dari masyarakat serta lembaga, pengungsi Rohingya tetap menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi sosial dan ekonomi. Bantuan internasional dan lokal memberikan bantuan penting, tetapi mereka tetap terhambat oleh kondisi ketidakpastian hukum dan terbatasnya akses ke sumber daya ekonomi yang lebih berkelanjutan. Peran pemerintah dan NGO sangat vital, namun ada kebutuhan mendesak untuk kebijakan yang lebih inklusif yang dapat memberikan pengungsi kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih

baik dan lebih stabil dalam jangka panjang.

Dinamika Hubungan dengan Masyarakat Lokal

Tingkat penerimaan masyarakat lokal terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada lokasi, latar belakang sosial, dan pengetahuan masyarakat mengenai situasi yang dihadapi oleh pengungsi. Di beberapa daerah, seperti Aceh, yang memiliki sejarah panjang solidaritas terhadap sesama Muslim, masyarakat lokal cenderung lebih menerima pengungsi Rohingya. Masyarakat Aceh, dengan nilai-nilai Islam yang kuat, sering kali menunjukkan sikap empati dan bantuan terhadap pengungsi Rohingya, baik dalam bentuk dukungan moral, material, maupun sosial. Namun, di tempat lain, ketidakpastian dan stereotip terhadap pengungsi bisa menimbulkan keraguan atau bahkan penolakan terhadap mereka. Beberapa kelompok masyarakat merasa khawatir bahwa pengungsi dapat mempengaruhi sumber daya yang terbatas atau menambah beban sosial, yang mengarah pada potensi ketegangan sosial (Sopamena, 2023).

Kolaborasi antara komunitas Rohingya dan masyarakat lokal di Indonesia cukup signifikan di beberapa daerah. Di daerah yang lebih menerima pengungsi, seperti Aceh, pengungsi Rohingya banyak terlibat dalam berbagai kegiatan bersama dengan masyarakat lokal, terutama dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Misalnya, mereka sering berpartisipasi dalam perayaan hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, yang mempererat ikatan sosial antar komunitas. Selain itu, beberapa NGO lokal dan internasional yang bekerja di lapangan juga berperan dalam memfasilitasi kolaborasi ini, dengan mengorganisir pelatihan keterampilan atau kegiatan penggalangan dana untuk mendukung kesejahteraan pengungsi. Keberadaan komunitas Rohingya tidak hanya terbatas pada sektor bantuan, tetapi juga mulai berperan aktif dalam kegiatan sosial yang lebih luas, memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat Indonesia.

Namun, tidak jarang pula terdapat ketegangan antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah yang lebih terbatas dalam hal sumber daya atau

di mana pengungsi dianggap sebagai beban tambahan. Di beberapa tempat, ketidakpahaman tentang kondisi pengungsi dan perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik, baik itu dalam hal persaingan pekerjaan, akses terhadap layanan publik, maupun masalah sosial lainnya. Hal ini sering kali diperburuk oleh stereotip atau informasi yang salah yang beredar di masyarakat, yang menggambarkan pengungsi sebagai ancaman bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, perbedaan bahasa dan kebiasaan sosial juga dapat memperburuk ketegangan antara kedua komunitas (Fauzan Aziima Ellandra 2024).

Di sisi lain, terdapat juga banyak contoh harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengungsi Rohingya yang berusaha membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal, dengan cara membantu dalam kegiatan komunitas atau memberikan sumbangan bagi yang membutuhkan. Interaksi yang positif ini memperlihatkan bahwa meskipun ada perbedaan budaya dan sosial, kesempatan untuk saling mendukung dan memahami tetap ada. Dalam beberapa kasus, hubungan ini bahkan berkembang menjadi persahabatan

yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama dalam memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Sebagai contoh, beberapa keluarga Rohingya yang telah lama tinggal di Indonesia sering kali dianggap sebagai bagian dari komunitas lokal, yang menunjukkan potensi harmoni yang dapat tercipta jika diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara lebih mendalam (Machmud dkk., 2024).

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara komunitas Rohingya dan masyarakat lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun ada tantangan dan ketegangan yang tak bisa dihindari, ada juga banyak peluang untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik, memperkuat solidaritas antar komunitas, dan mengurangi stigma terhadap pengungsi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kebijakan yang mendukung integrasi, hubungan antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal bisa berkembang menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan.

Dampak Global dan Regional

Indonesia memainkan peran penting dalam isu pengungsi

Rohingya di kawasan ASEAN, terutama mengingat posisi geografisnya yang strategis dan peranannya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berusaha untuk mendorong kerjasama antarnegara anggota dalam menangani masalah pengungsi Rohingya, baik dari segi perlindungan, bantuan kemanusiaan, maupun upaya diplomatik. Indonesia telah menyuarakan pentingnya solusi yang berfokus pada hak asasi manusia dan penghormatan terhadap integritas wilayah negara, terutama dalam konteks Myanmar, yang merupakan negara asal pengungsi Rohingya. Melalui forum-forum seperti ASEAN, Indonesia secara aktif mendesak negara-negara anggota untuk memberikan respons yang lebih humanis terhadap pengungsi, meskipun tantangan politik dalam kawasan sering kali menghambat upaya tersebut (Rosyid, 2019).

Di tingkat internasional, Indonesia juga berkontribusi dalam memberikan solusi bagi krisis Rohingya dengan memainkan peran diplomatik yang aktif. Indonesia menjadi salah satu negara yang secara tegas mengutuk kekerasan terhadap Rohingya yang

terjadi di Myanmar dan mendorong masyarakat internasional untuk menekan Myanmar agar menghentikan tindakan tersebut serta memberi hak yang setara kepada etnis Rohingya. Indonesia telah berperan sebagai mediator dalam beberapa upaya perdamaian di kawasan tersebut, termasuk mendukung upaya PBB dalam memfasilitasi dialog antara Myanmar dan negara-negara yang terpengaruh, serta meningkatkan kesadaran global mengenai penderitaan yang dialami oleh Rohingya. Indonesia juga menyuarakan pentingnya penerimaan pengungsi dengan prinsip solidaritas internasional, meskipun dengan keterbatasan yang ada, Indonesia telah memberikan tempat bagi banyak pengungsi Rohingya, khususnya yang tiba di wilayah Aceh dan sekitarnya (O'Brien dan Hoffstaedter, 2020).

Selain itu, Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif kemanusiaan dan bantuan langsung untuk pengungsi Rohingya, baik yang berada di Indonesia maupun di negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Pemerintah Indonesia, bersama dengan organisasi kemanusiaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), memberikan

bantuan makanan, medis, pendidikan, dan dukungan psikososial kepada pengungsi Rohingya yang ada di wilayahnya. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional untuk mendorong negara donor memberikan bantuan yang lebih besar bagi pengungsi Rohingya, terutama dalam menghadapi tantangan besar dalam hal pengungsi yang terus meningkat dan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai contoh negara yang memperlihatkan komitmen terhadap prinsip kemanusiaan, meskipun menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas dan sumber daya (Ramadhan, 2023).

Dampak dari kontribusi Indonesia dalam menghadapi krisis pengungsi Rohingya ini memberikan pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kebijakan negara-negara ASEAN dan dunia. Dengan upaya diplomatik dan inisiatif kemanusiaannya, Indonesia mengajak negara-negara lain untuk lebih peduli dan bertindak terhadap krisis ini, baik melalui penerimaan pengungsi maupun melalui penyelesaian konflik yang lebih adil bagi Rohingya di Myanmar. Meskipun

tantangan besar masih ada, terutama dalam hal tekanan politik, Indonesia tetap berusaha memegang teguh komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan solusi jangka panjang bagi etnis Rohingya.

Kontroversi Rohingya terhadap Indonesia

Kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul di tengah masyarakat. Meskipun terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, terutama di wilayah seperti Aceh, sebagian masyarakat lokal di daerah lain menunjukkan resistensi terhadap keberadaan pengungsi. Ketegangan ini dipicu oleh anggapan bahwa para pengungsi membawa beban tambahan bagi sumber daya lokal yang terbatas, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Dalam konteks ini, pengungsi kerap dianggap sebagai pesaing bagi masyarakat miskin lokal yang juga tengah berjuang dalam keterbatasan ekonomi (Aprina dkk, 2025).

Selain itu, isu keamanan juga menjadi bagian dari kontroversi yang berkembang. Beberapa pihak mengkhawatirkan kemungkinan penyusupan jaringan perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara

dalam gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang menempuh perjalanan laut. Kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak dari mereka masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, sehingga tidak melewati proses pemeriksaan yang ketat. Meskipun tidak ada bukti yang kuat mengenai keterlibatan pengungsi dalam kriminalitas, persepsi ini dapat memperburuk stigma terhadap komunitas Rohingya dan meningkatkan penolakan dari masyarakat lokal (Habadza, 2025).

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Indonesia ingin mempertahankan citra sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas regional. Di sisi lain, belum adanya payung hukum nasional yang spesifik untuk pengungsi, serta belum diratifikasinya Konvensi 1951, menyebabkan pemerintah menghadapi keterbatasan dalam merumuskan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan dalam penanganan pengungsi di tingkat daerah, yang terkadang dihadapkan pada tekanan sosial dan politik dari

masyarakat setempat (Habadza, 2025).

Di tingkat internasional, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk lebih aktif dalam menangani isu pengungsi Rohingya. Komunitas internasional mengapresiasi langkah-langkah kemanusiaan yang telah dilakukan, tetapi juga menuntut komitmen yang lebih besar, termasuk penyediaan tempat tinggal jangka panjang, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi pengungsi. Tekanan ini tidak selalu sejalan dengan kapasitas dan kebijakan dalam negeri, yang masih berorientasi pada perlindungan sementara dan tidak memiliki skema integrasi formal. Ketidaksesuaian ekspektasi ini menjadi sumber kontroversi lain yang perlu direspon dengan kebijakan yang bijak dan terukur (Aling, 2024).

Secara keseluruhan, kontroversi yang menyertai keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan antara nilai kemanusiaan, keterbatasan sumber daya, kepentingan nasional, dan dinamika geopolitik regional. Situasi ini menunjukkan pentingnya penyusunan kebijakan pengungsi yang lebih komprehensif, inklusif, dan

berorientasi jangka panjang. Edukasi publik yang bertujuan mengurangi stigma, transparansi kebijakan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional menjadi langkah penting untuk meredam kontroversi dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara pengungsi dan masyarakat Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya etnis Rohingya di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status hukum yang tidak jelas, keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di lingkungan yang baru. Meskipun komunitas Rohingya di Indonesia memperoleh dukungan dari masyarakat lokal, terutama di Aceh, mereka masih menghadapi hambatan signifikan dalam hal integrasi sosial dan ekonomi. Di sisi lain, solidaritas dari NGO dan lembaga internasional memberikan bantuan penting bagi pengungsi, meskipun keberlanjutan bantuan tersebut menjadi isu yang

harus diperhatikan. Interaksi antara budaya Rohingya dan Indonesia juga menunjukkan adanya dinamika yang saling memengaruhi, dengan beberapa elemen budaya lokal berbaur dengan tradisi Rohingya, namun juga menciptakan tantangan dalam proses adaptasi.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya adalah ketidakpastian hukum, diskriminasi sosial, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, sementara peluang untuk integrasi terletak pada pemberian akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja. Untuk itu, rekomendasi untuk pemerintah Indonesia adalah untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif yang memungkinkan pengungsi Rohingya mendapatkan akses yang lebih besar ke layanan dasar dan status hukum yang lebih jelas. Selain itu, NGO dan komunitas internasional perlu terus memperkuat kolaborasi dalam menyediakan dukungan yang berkelanjutan bagi pengungsi, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun inisiatif integrasi sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah Islam*. Yogyakarta, Indonesia: Ombak.
- Addini, F. (2025). *Peran organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh: Studi kasus Flower Aceh dan Aceh Women's for Peace Foundation*.
- Ahmad, N., Dewi, A., Zalvadhia, N. K., Putri, N. F., & Kusuma, A. J. (2024). Peran masyarakat Aceh dan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(9), 11–20.
- Aling, D. M. R., Senewe, E. V. T., & Lengkong, N. L. (2024). Analisis yuridis krisis pengungsi Rohingya di Aceh dan peranan UNHCR di Indonesia berdasarkan hukum organisasi internasional. *Lex Privatum*, 14(3).
- Aprina, E., Anggraini, A. F., & Lestari, S. D. (2025). *Eskalasi gelombang pengungsi Rohingya di Indonesia: Praktik penanganan serta implikasinya*.
- Asmara, M. T., & Syahrin, M. A. (2019). Actualization of Indonesian immigration policy related to human rights for refugees in Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 73–84. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.174>
- Dwijayanto, A., Fathoni, K., & Afif, Y. U. (2019). *Diaspora Muslim Rohingya di Indonesia: Minoritas, militansi dan pencarian identitas*.
- Fauzan, A. E., & Putra, Z. Z. S. (2024). Dilema penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia dari perspektif etika pembuatan keputusan. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13731787>
- Habadza, A. (2025). Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam menangani polemik pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 386–392.
- Hamdi, M. A., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena pencari suaka dan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>
- Hartanto, D. R. (2024). Implikasi dan dampak berlabuhnya pengungsi Rohingya di daratan Indonesia terhadap keamanan maritim: Studi kasus dan analisis potensial ancaman. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Maritim*, 8(2), 19–29. <https://doi.org/10.52475/saintara.v8i2.310>
- Hidayatullah, S., & Novialdi, R. (2023). *Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika penanganan pengungsi Rohingya tahun 2015–2022*.

- Hossain, A. N. M. Z. (2023). Educational crisis of Rohingya refugee children in Bangladesh: Access, obstacles, and prospects to formal and non-formal education. *Heliyon*, 9(7).
<https://doi.org/10.3390/socsci9110209>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.
- Machmud, N., Al-Mubaroq, H. Z., & Duarte, E. P. (2024). *Strategi integrasi sosial dan ekonomi imigran ilegal Rohingya di wilayah perbatasan Indonesia–Myanmar*, 8(1).
- Mardiyanto, I. (2024). Problematika hukum internasional dalam kebijakan deportasi pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis kritis prinsip non-refoulement. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 5533–5552.
- Nabilah, O., Anggian, K. Y., & Bakti, A. M. F. (2024). Solidaritas Aceh untuk pengungsi Rohingya: Fachrul Reza pada media Getty Image, postmodernisme. *Komsopol*, 4(2), 69–80.
- Nuke, T. (2022). Peran dan relasi pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-pengungsi-lt621c3d99142f5/>
- O'Brien, M., & Hoffstaedter, G. (2020). "There we are nothing, here we are nothing!": The enduring effects of the Rohingya genocide. *Social Sciences*, 9(11).
<https://doi.org/10.3390/socsci9110209>
- Rahmatillah, S. (2025). *Pengaruh literasi peraturan perundang-undang pada Rohingya (Studi kasus pada pengungsi Rohingya di Aceh)*.
- Ramadhan, A. N. (2023). *Diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar dalam membantu etnis Rohingya*.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia dalam menangani etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Sampaothong, T. (2023, November 29). *Rohingya: Antara konflik agama dan etnis berujung penolakan di Indonesia*. Buletin Macapat. Diambil dari <https://macapat.ub.ac.id/rohingya-antara-konflik-agama-dan-etnis-di-myanmar/>
- Satria, A. N. (2023, Desember 22). *Pengamat UGM: Perlu diplomasi lebih gigih selesaikan kasus pengungsi Rohingya*. Universitas Gadjah Mada. Diambil dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-perlu-diplomasi-lebih-gigih-selesaikan-kasus-pengungsi-rohingya/>
- Setiaji, A. B., & Fajriani. (2022). Analisis wacana kritis: Pemberitaan konflik Rohingya di media komunikasi. *Lingue: Jurnal Bahasa, Budaya, dan Sastra*, 4(1), 51–66.

- Siregar, N. M., & Lubis, A. (2019). Komunikasi antarbudaya etnis Rohingya dalam upaya eksistensi diri di pengungsian Kota Medan. *Persepsi: Communication Journal*, 2(2), 70–86.
<https://doi.org/10.30596/persepsi.v2i2.3951>
- Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya dan potensi konflik & kemajemukan horizontal di Aceh. *Jurnal Caraka Prabhu*, 7(2), 85–115.
<https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>
- Wildan, M. (2022). *Muslim minoritas kontemporer: Sejarah Islam, tantangan ekstremisme, diskriminasi, dan Islamofobia*.